

Sosialisasi & Pelatihan PeningkatanPartisipasi Politik Pelajar sebagai Pemilih Pemula di SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi

Socialisation & Training on Increasing Political Participation of Students as First Time Voters at SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi

Baktiaawan Nusanto ^{1*}, Dodik Aris Setiawan ²

¹ Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

² Prodi Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Email : baktiawannusanto@unmuhjember.ac.id

*Penulis Korespondensi: baktiawannusanto@unmuhjember.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 04 Januari 2026;

Revisi: 18 Februari 2026;

Diterima: 02 Maret 2026;

Tersedia: 05 Maret 2026

Keywords: First-Time Voters, Political Education, Political Participation, Regional Development, Vocational School Students.

Abstract: The level of political participation among first-time voters in Indonesia is still relatively low and is often not supported by an adequate understanding of the political process and democracy. This condition is also found among students at SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi, most of whom have not received targeted political education, even though they have great potential in determining the direction of regional development in the future. Therefore, a programme to strengthen political literacy is needed to increase the awareness, involvement, and responsibility of students as first-time voters. The objectives of this community service activity are to increase political understanding, active participation in simulated democratic processes, and to foster a critical and caring attitude towards regional development. Students are expected not only to understand the government system and political institutions, but also to be able to participate rationally in public decision-making processes. The implementation methods include interactive digital media-based political education outreach, focus group discussions (FGD) on regional development issues, as well as election simulations and the role of state institutions. The expected outcomes are: an increase in students' political understanding of at least 70%, active participation of at least 85% of participants in the entire series of activities, and the development of political education media in the form of digital modules and socialisation videos. This programme is expected to become a model for practical political education in schools so that it can foster a young generation that is politically savvy, tolerant, and actively contributes to the development of the Banyuwangi region.

Abstrak

Tingkat partisipasi politik di kalangan pemilih pemula di Indonesia masih relatif rendah dan seringkali tidak didukung oleh pemahaman yang memadai tentang proses politik dan demokrasi. Kondisi ini juga ditemukan di kalangan siswa SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi, yang sebagian besar belum menerima pendidikan politik yang tepat sasaran, padahal mereka memiliki potensi besar dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa depan. Oleh karena itu, program penguatan literasi politik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan tanggung jawab siswa sebagai pemilih pemula. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman politik, partisipasi aktif dalam simulasi proses demokrasi, dan menumbuhkan sikap kritis dan peduli terhadap pembangunan daerah. Siswa diharapkan tidak hanya memahami sistem pemerintahan dan lembaga politik, tetapi juga mampu berpartisipasi secara rasional dalam proses pengambilan keputusan publik. Metode pelaksanaannya meliputi penyuluhan pendidikan politik berbasis media digital interaktif, diskusi kelompok fokus (FGD) tentang isu-isu pembangunan daerah, serta simulasi pemilu dan peran lembaga negara. Hasil yang diharapkan adalah: peningkatan pemahaman politik siswa minimal 70%, partisipasi aktif minimal 85% peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan, dan pengembangan media

pendidikan politik berupa modul digital dan video sosialisasi. Program ini diharapkan menjadi model pendidikan politik praktis di sekolah sehingga dapat membina generasi muda yang cerdas secara politik, toleran, dan aktif berkontribusi pada pembangunan wilayah Banyuwangi.

Kata Kunci : Partisipasi Politik; Pemilih Pemula; Pendidikan Politik; Pembangunan Daerah; Pelajar SMK

1. PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya serta mampu berpartisipasi secara rasional dalam kehidupan demokrasi. Dalam perspektif pendidikan demokrasi, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer pengetahuan tentang sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai arena pembentukan budaya demokratis yang menumbuhkan sikap kritis, toleran, dan bertanggung jawab (Zamroni, 2013). Literasi politik dalam konteks ini mencakup pemahaman terhadap proses politik, kemampuan menganalisis informasi publik, serta kesiapan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama (Ubaedillah & Rozak, 2017).

Kelompok pemilih pemula memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi karena mereka memasuki ruang partisipasi politik pada fase pembentukan identitas sosial dan politik. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda seringkali belum diiringi dengan kedalaman literasi politik yang memadai. Di era digital, dinamika tersebut semakin kompleks karena media sosial menjadi sumber utama informasi politik, yang tidak selalu diiringi dengan kemampuan verifikasi dan analisis kritis (Heryanto, 2018). Kondisi ini berpotensi melahirkan partisipasi yang bersifat emosional, pragmatis, atau bahkan apatis apabila tidak disertai pendampingan literasi yang sistematis.

Dalam konteks pendidikan menengah kejuruan, pendidikan politik seringkali belum menjadi perhatian utama karena fokus pembelajaran lebih diarahkan pada penguatan kompetensi vokasional. Padahal, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Artinya, pembelajaran politik tidak boleh berhenti pada ranah kognitif, tetapi perlu diimplementasikan melalui pendekatan partisipatif yang memberi pengalaman langsung berdemokrasi. Pendidikan politik berbasis pengalaman seperti diskusi terarah, simulasi pemilu, dan role play terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman sekaligus keterlibatan aktif peserta didik (Satori et al., 2017).

SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi merupakan lembaga pendidikan vokasi dengan karakteristik siswa berusia 16–18 tahun yang secara demografis akan segera memasuki kategori pemilih pemula pada Pemilu dan Pilkada mendatang. Hasil observasi awal

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami secara komprehensif struktur pemerintahan, fungsi lembaga negara, serta peran strategis mereka dalam pembangunan daerah. Minimnya ruang dialektika politik di sekolah serta keterbatasan metode pembelajaran yang kontekstual menyebabkan siswa cenderung memandang politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, Banyuwangi sebagai daerah yang berkembang membutuhkan partisipasi generasi muda dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesadaran politik yang rendah pada pemilih pemula berpotensi menurunkan kualitas partisipasi demokratis di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan literasi politik menjadi langkah preventif sekaligus strategis untuk membentuk warga muda yang mampu berargumentasi secara rasional, memilah informasi publik secara kritis, serta memahami keterkaitan antara kebijakan politik dan pembangunan daerah (Hadi & Zamroni, 2023).

Berdasarkan kerangka teoretis dan kondisi empiris tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu rendahnya literasi politik pelajar, minimnya metode pembelajaran demokrasi yang aplikatif, terbatasnya ruang diskusi publik di lingkungan sekolah, serta tingginya paparan informasi digital tanpa kemampuan filterisasi yang memadai. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif dan kontekstual.

Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk Peningkatan Partisipasi Politik Pelajar dalam Pembangunan Daerah di SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat literasi politik siswa melalui pendekatan edukasi partisipatif berbasis media digital, diskusi kelompok terarah, dan simulasi proses demokrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran politik yang reflektif serta meningkatkan kesiapan siswa sebagai pemilih cerdas yang berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Selain memberikan dampak langsung pada mitra, program ini juga berpotensi menjadi model pendidikan politik kontekstual berbasis sekolah vokasi yang dapat direplikasi pada satuan pendidikan lain.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi dengan fokus pada penguatan literasi politik dan keterampilan partisipatif pelajar sebagai pemilih pemula. Metode pelaksanaan dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan mitra yang menunjukkan rendahnya pemahaman politik serta terbatasnya pengalaman praktik demokrasi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pendekatan yang

digunakan adalah pendidikan politik partisipatif berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan dukungan media digital interaktif.

Secara operasional, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam empat tahapan intervensi yang saling terintegrasi. Tahap pertama adalah penguatan literasi politik melalui penyuluhan dan workshop pemilih pemula. Materi yang diberikan meliputi sistem demokrasi di Indonesia, fungsi dan peran lembaga negara, mekanisme pemilu, serta urgensi partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan bantuan modul digital dan tayangan video edukatif agar lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh siswa SMK. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah kegiatan selesai guna mengetahui peningkatan pemahaman peserta secara kuantitatif.

Tahap kedua berfokus pada penguatan keterampilan partisipatif melalui diskusi kelompok terarah (FGD) dan latihan komunikasi publik. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan isu pembangunan daerah yang relevan dengan kehidupan mereka. Fasilitator memandu proses dialog agar siswa mampu menyampaikan pendapat secara argumentatif dan menghargai perbedaan pandangan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan simulasi debat kebijakan sederhana yang bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis, analisis masalah, serta keberanian menyampaikan gagasan di ruang publik.

Tahap ketiga berupa simulasi pemilu dan tata kelola demokrasi sekolah. Pada tahap ini, siswa mengikuti seluruh tahapan proses pemilihan secara sistematis, mulai dari pencalonan, penyusunan visi-misi, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil secara transparan. Simulasi dirancang menyerupai mekanisme pemilu yang sesungguhnya agar peserta memperoleh pengalaman autentik mengenai praktik demokrasi. Selain meningkatkan pemahaman prosedural, kegiatan ini juga menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

Tahap keempat adalah penguatan literasi digital politik sebagai upaya preventif terhadap paparan misinformasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui workshop verifikasi informasi, identifikasi hoaks, serta edukasi etika bermedia sosial dalam konteks politik. Peserta diberikan contoh kasus aktual yang sering muncul di ruang digital agar mampu membedakan informasi yang kredibel dan provokatif. Hasil kegiatan ini diharapkan membentuk budaya digital yang lebih sehat di lingkungan sekolah.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses mencakup observasi tingkat partisipasi siswa dalam diskusi, keterlibatan dalam simulasi, serta dinamika interaksi selama kegiatan berlangsung. Evaluasi hasil dilakukan

melalui perbandingan skor pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan literasi politik, serta penilaian rubrik terhadap kemampuan komunikasi dan argumentasi peserta. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk melihat persentase peningkatan pemahaman, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui umpan balik siswa dan guru pendamping mengenai dampak kegiatan.

Keberlanjutan program dijamin melalui penyediaan modul digital literasi politik, dokumentasi video kegiatan, serta penyusunan prosedur operasional standar (SOP) pemilu OSIS yang lebih transparan. Pihak sekolah dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi agar model pembelajaran demokrasi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan. Tim pelaksana terdiri atas dosen sebagai koordinator dan penyusun materi, anggota tim sebagai fasilitator diskusi, serta mahasiswa sebagai pendamping teknis dan dokumentator kegiatan. Pelibatan mahasiswa juga mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam konteks penguatan kapasitas kewarganegaraan.

Dengan desain metode yang sistematis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan mitra, kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan peningkatan pemahaman politik minimal 70% serta keterlibatan aktif peserta minimal 85% dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini tidak hanya menysasar aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap kritis dan keterampilan demokratis pelajar sebagai pemilih pemula yang bertanggung jawab.



Gambar 1. Diagram Metode Pelaksanaan PKM.

3. HASIL

Pelaksanaan program pengabdian “Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Pelajar sebagai Pemilih Pemula di SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi” dilaksanakan secara bertahap selama sepuluh bulan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan partisipatif pelajar.

1. Peningkatan Literasi Politik Pelajar

Tahap awal kegiatan difokuskan pada penguatan literasi politik melalui penyuluhan, pemaparan materi berbasis media digital interaktif, serta distribusi modul edukasi politik pemilih pemula. Materi yang disampaikan mencakup sistem demokrasi di Indonesia, fungsi lembaga negara, mekanisme pemilu, serta peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman politik siswa secara signifikan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum mampu menjelaskan secara tepat perbedaan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta belum memahami tahapan pemilu secara komprehensif. Setelah intervensi, mayoritas siswa mampu menjelaskan kembali alur pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam pembangunan daerah. Target peningkatan pemahaman minimal 70% secara umum tercapai berdasarkan perbandingan skor awal dan akhir.

Secara kualitatif, siswa mulai menunjukkan perubahan persepsi terhadap politik. Jika pada awal kegiatan politik dipandang sebagai sesuatu yang jauh dan rumit, pada akhir sesi banyak peserta menyampaikan bahwa politik memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan sekolah dan pembangunan daerah yang mereka rasakan sehari-hari.

2. Penguatan Keterampilan Partisipatif

Tahapan berikutnya berfokus pada pengembangan kemampuan partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD), latihan debat kebijakan, serta penyusunan gagasan kebijakan sederhana berbasis isu lingkungan sekolah dan daerah.

Dalam kegiatan FGD, siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan diminta mengidentifikasi persoalan pembangunan yang mereka anggap relevan, seperti pengelolaan sampah, fasilitas publik, dan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial. Proses diskusi menunjukkan peningkatan keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat. Apabila pada sesi awal hanya sebagian kecil peserta yang aktif berbicara, pada sesi lanjutan partisipasi meningkat secara signifikan hingga melibatkan lebih dari 80% peserta.

Latihan debat kebijakan sekolah juga memberikan dampak positif terhadap kemampuan argumentasi. Siswa mulai mampu menyusun pendapat berbasis alasan yang logis, meskipun masih dalam tahap pengembangan. Beberapa kelompok mampu mengaitkan usulan kebijakan dengan kebutuhan nyata di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan mulai terbentuknya kesadaran berpikir kritis dan kemampuan

menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

3. Implementasi Simulasi Pemilu Sekolah

Simulasi pemilu menjadi salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian peserta. Kegiatan ini dirancang menyerupai tahapan pemilu yang sebenarnya, mulai dari pendaftaran kandidat, penyusunan visi dan misi, kampanye terbuka, hingga pemungutan dan penghitungan suara secara transparan.

Seluruh siswa terlibat aktif dalam proses simulasi, baik sebagai pemilih, panitia, maupun kandidat. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis mengenai prosedur pemilu, tetapi juga menanamkan nilai integritas, sportivitas, dan transparansi. Peserta belajar bahwa proses demokrasi tidak berhenti pada pemberian suara, tetapi juga mencakup tanggung jawab mengawal hasil dan menghormati pilihan mayoritas.

Hasil evaluasi pasca simulasi menunjukkan peningkatan pemahaman alur pemilu secara lebih konkret dibandingkan hanya melalui ceramah atau teori. Siswa mengaku lebih memahami makna suara sebagai hak sekaligus tanggung jawab politik.

4. Peningkatan Literasi Digital Politik

Intervensi pada aspek literasi digital politik dilaksanakan melalui workshop cek fakta, analisis konten media sosial, serta diskusi mengenai etika komunikasi politik di ruang digital. Peserta diberikan contoh kasus informasi politik yang bersifat provokatif dan diajak mengidentifikasi ciri-ciri hoaks.

Hasil tes identifikasi informasi menunjukkan bahwa mayoritas siswa mengalami peningkatan kemampuan dalam membedakan berita faktual dan informasi manipulatif. Siswa mulai memahami pentingnya verifikasi sumber dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Selain itu, muncul kesadaran untuk menjaga etika dalam berdiskusi di media sosial.

5. Dampak terhadap Mitra

Secara umum, pihak sekolah menyambut baik program ini karena dinilai memberikan ruang pembelajaran demokrasi yang selama ini belum terfasilitasi secara optimal. Guru pendamping menyatakan bahwa siswa terlihat lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat serta lebih kritis terhadap isu publik yang berkembang.

Program ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah sebagai mitra dalam penguatan pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual. Pendekatan partisipatif dan berbasis pengalaman langsung terbukti lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran satu arah.

4. DISKUSI

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan politik yang partisipatif dan kontekstual efektif dalam meningkatkan literasi politik pemilih pemula di SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi. Peningkatan skor pre-test dan post-test menegaskan bahwa kombinasi penyuluhan berbasis media digital, diskusi kelompok terarah (FGD), dan simulasi demokrasi mampu memperkuat pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis peserta. Pembelajaran tidak hanya berhenti pada aspek kognitif, tetapi berkembang pada sikap dan kesadaran partisipatif.

Rendahnya literasi politik yang teridentifikasi pada tahap awal berkaitan dengan minimnya praktik demokrasi di lingkungan sekolah. Melalui simulasi pemilu, role play, dan diskusi isu pembangunan daerah, peserta memperoleh pengalaman langsung mengenai proses pengambilan keputusan publik. Pendekatan dialogis ini terbukti meningkatkan keberanian berpendapat dan kemampuan argumentasi secara rasional, sekaligus mengurangi sikap apatis terhadap isu politik.

Program ini juga memperlihatkan pentingnya integrasi literasi digital dalam pendidikan politik. Peserta mulai menunjukkan kemampuan lebih selektif dalam menyikapi informasi politik setelah memperoleh pemahaman mengenai risiko misinformasi. Tingginya partisipasi selama kegiatan menegaskan bahwa metode experiential learning lebih sesuai dengan karakter pelajar SMK yang aplikatif dan aktif.

Dukungan sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan program. Meskipun waktu pelaksanaan terbatas, penyusunan modul digital dan media edukasi menjadi strategi penguatan agar dampak kegiatan tetap berlanjut. Secara keseluruhan, model edukasi politik partisipatif ini relevan untuk direplikasi sebagai upaya sistematis membangun generasi muda yang cerdas politik dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sudah dilakukan sesuai tahap yang direncanakan dari awal Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Masalah, Sosialisasi dan Pelatihan, Monitoring Pendampingan Implementasi di Kelas, Evaluasi dan Refleksi



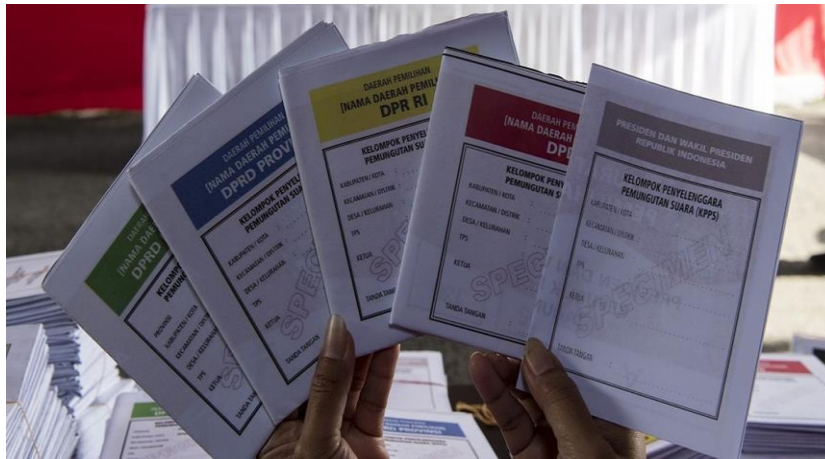
Gambar 1. Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Masalah.



Gambar 2. Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Masalah.



Gambar 3. Sosialisasi & Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Pelajar Sebagai PemilihPemula di SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi.



Gambar 4 . Simulasi Peningkatan Partisipasi Politik Pelajar Sebagai PemilihPemula di SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi menunjukkan bahwa penguatan literasi politik melalui pendekatan partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pelajar sebagai pemilih pemula. Melalui penyuluhan, FGD, simulasi pemilu, dan edukasi literasi digital, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga pengalaman praktik berdemokrasi secara langsung.

Hasil evaluasi memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman politik berdasarkan perbandingan pre-test dan post-test, serta meningkatnya partisipasi aktif dan keberanian berpendapat dalam forum diskusi. Target peningkatan pemahaman dan partisipasi yang direncanakan dalam proposal dapat tercapai melalui metode pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Selain itu, penguatan literasi digital membantu siswa lebih kritis dalam menyikapi informasi politik di media sosial.

Dukungan pihak sekolah menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan program, antara lain melalui pemanfaatan modul digital, perbaikan tata kelola pemilu internal sekolah, serta pembentukan kader siswa sadar politik. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi dalam membangun budaya demokrasi di lingkungan sekolah dan berpotensi direplikasi sebagai model pendidikan politik berbasis sekolah vokasi untuk mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam pembangunan daerah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Sekolah, dewan guru, serta seluruh siswa SMK Muhammadiyah 7 Purwoharjo Banyuwangi atas dukungan, keterbukaan, dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Komitmen dan kerja sama yang diberikan sejak tahap persiapan hingga evaluasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan program.

Partisipasi aktif para siswa dalam setiap rangkaian kegiatan, mulai dari penyuluhan, diskusi kelompok terarah, hingga simulasi proses demokrasi, menunjukkan semangat belajar dan keterlibatan yang konstruktif. Dukungan penuh dari pihak sekolah turut memastikan kegiatan berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Semoga kolaborasi yang telah terjalin ini dapat terus berlanjut dalam bentuk program penguatan literasi politik yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, A. F., & Rudianto, D. (2012). *Tata kelola bernegara dalam perspektif politik*. Golden Terayon Press.
- Amin, A., & Ismail, R. (2022). Pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi pemilih muda. *Jurnal Politik Indonesia*, 15(3), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jpi.v15i3.112>
- Fadhilah, N., & Taufik, M. (2022). Partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu melalui media sosial. *Jurnal Komunikasi Politik*, 9(2), 203-218. <https://doi.org/10.2217/jkp.v9i2.443>
- Hadi, M. S., & Zamroni. (2023). Pendidikan politik dan partisipasi pemilu di pesantren: Perspektif nilai-nilai pendidikan Islam. *Maktab: Borneo Journal of Islamic Education*, 2(2), 35-54.
- Hermawan, R., & Ngindana, R. (2020). Pendidikan politik kebangsaan berbasis pesantren. *JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 154-164. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v3i2.6704>
- Nugroho, A., & Hartanto, B. (2020). Kajian pengaruh pendidikan politik terhadap perilaku sosial masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(4), 110-125. <https://doi.org/10.2217/jis.v14i4.421>
- Razak, M. R. R., et al. (2024). *Administrasi publik di era digitalisasi*. Eureka Media Aksara.
- Satori, A., Andrias, M. A., & Mubarok, H. (2017). IbP pendidikan politik dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan santri pondok pesantren di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 3(1). <https://doi.org/10.37058/jsppm.v3i1.235>

- Suryadi, A., & Lestari, E. (2021). Implementasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 85-98. <https://doi.org/10.3456/jpk.v7i2.305>
- Susanto, R., & Wahyu, H. (2023). Peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(1), 27-39. <https://doi.org/10.6789/jps.v5i1.223>
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa*. Guepedia.
- Syamsuadi, A., Zamhasari, Z., Hartati, S., & Trisnawati, L. (2020). Pragmatisme partai Islam: Strategi politik terbuka Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2018. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 1-22. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.8162>
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2017). *Pendidikan kewarganegaraan (Civic education): Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. Prenadamedia Group.
- Wathoni, K. (2020). Pesantren dalam politik dan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02), 128-140. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2628>
- Zamroni. (2013). *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Ombak.